

Analisis Wacana Free West Papua Campaign pada Operasi Militer Indonesia dalam Konflik Nduga: Sebuah Tinjauan Kritis

Diana Nur Rumila¹, Yusli Effendri²
Universitas Brawijaya

ABSTRACT

Mainstream narratives on Indonesia's military operation in West Papua describe it to help the conflicting region achieve peace and prosperity. This hegemonic and widely held public opinion is more often used to justify the behavior of the Indonesian Government in West Papua. This research aims to offer an alternative perspective on the matter by looking at the narrative promoted and written by Free West Papua Campaign (FWPC) on their news reports about the Nduga Conflict in 2018-2019 from their website: freewestpapua.org. Norman Fairclough's critical discourse analysis examines the discourse created from the news coverage within the three-dimensional analysis, namely the textual, the discourse practices, and sociocultural dimensions. Results show that FWPC depicts Indonesia's military as exploiters of the indigenous Papuans. At the same time, FWPC also tries to build a sense of belonging to gain support from the international society and online activists.

Keywords: Free West Papua Campaign, West Papuan Conflict, Military Operation, Nduga, Discourse Analysis

PENDAHULUAN

Kemunculan kegiatan kampanye politik kontemporer diawali dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan peningkatan ketertarikan khalayak terhadap penggunaan internet. Fenomena ini tentunya berpengaruh terhadap meningkatnya relevansi peran media *online* seperti *website* dan sosial media sebagai media penggiring opini dalam dunia politik. Kemampuan penyebaran konten – konten atau informasi tertentu secara masif dan cepat yang ditawarkan oleh media *online* tentunya dipandang sebagai sebuah kesempatan oleh para aktor politik untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Salah satu aktor politik yang menjadikan media *online* sebagai media representasi kepentingan mereka adalah Free West Papua Campaign atau FWPC.

Salah satu strategi FWPC adalah dengan memberitakan fenomena – fenomena terkait dengan konflik Papua Barat khususnya kegiatan operasi gabungan militer antara TNI/Polri pasca terjadinya kekerasan bersenjata pada 2 Desember 2018 di Nduga yang telah merenggut korban jiwa. Wacana operasi militer seringkali ditemukan dalam diskusi konflik Papua Barat. Bukan tanpa sebab, keterkaitan antara operasi militer dan konflik Papua Barat ini diakibatkan oleh bagaimana Pemerintah Indonesia sering kali menggunakan pendekatan keamanan dalam bentuk operasi militer dalam menyelesaikan konflik – konflik yang terjadi di Papua Barat. Jika ditelusuri melalui perspektif sejarah, eksistensi operasi militer di tanah Papua sendiri diawali dengan penyelenggaraan operasi militer Tri Komando Rakyat atau yang sering kali dikenal sebagai TRIKORA pada tahun 1961. Singkatnya, operasi militer ini dilaksanakan sebagai sebuah strategi pemerintah Indonesia untuk ‘merebut’ kembali wilayah Papua dalam sengketa dengan Belanda.

Meskipun pada akhirnya wilayah Papua berhasil di klaim oleh Indonesia, kehadiran operasi militer di tanah Papua tidak pernah berakhir sampai detik ini. Pengasosiasian wacana terhadap operasi militer ini pun berkembang sesuai dengan konteks sosial yang ada. Tetapi

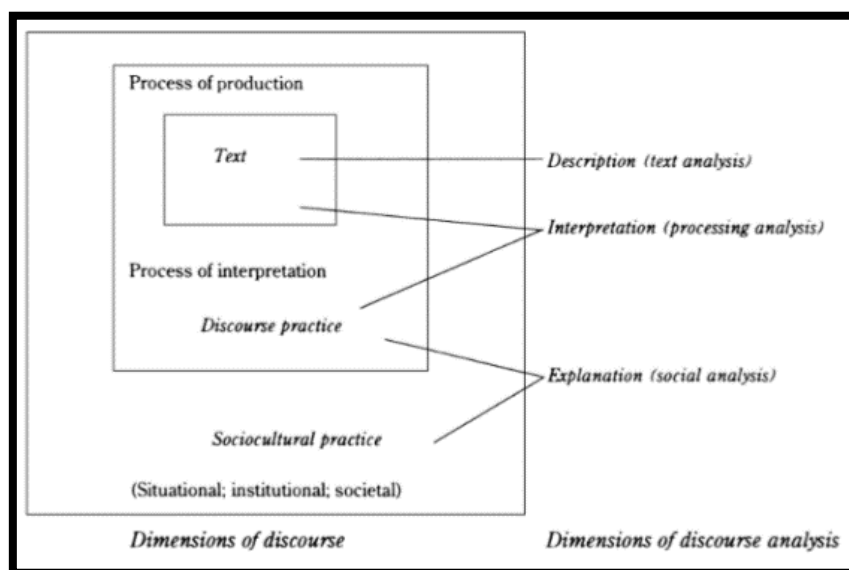
karena berbagai proses politik yang melanggengkan kuasa dan hegemoni pemerintah Indonesia terhadap wacana – wacana konflik Papua Barat, Masyarakat Indonesia cenderung melihat konflik Papua Barat ini dengan menggunakan narasi dominan yang telah dinormalisasikan oleh Pemerintah Indonesia. Seperti, pandangan bahwa eksistensi operasi militer dan pembangunan oleh Pemerintah Indonesia di tanah Papua merupakan satu-satunya jalan untuk meraih kesejahteraan dan perdamaian di Papua. Selain itu, pandangan terkait dengan stereotip – stereotip masyarakat Papua yang sering kali dikaitkan dengan kata yang memiliki konotasi negatif seperti separatis, terbelakang dan lain – lain. Keadaan seperti ini menimbulkan sebuah pola di mana masyarakat Indonesia cenderung melegitimasi secara penuh atau bahkan menormalisasi semua bentuk langkah – langkah yang diambil Pemerintah Indonesia terkait dengan penyelesaian konflik Papua Barat. contohnya adalah seperti penggunaan pendekatan keamanan yang dilaksanakan secara terus – menerus.

Dengan penelitian ini, peneliti mencoba memberikan perspektif baru melalui narasi alternatif dari pihak Free West Papua Campaign dengan menganalisis strategi kampanye mereka dalam mempresentasikan isu - isu konflik yang berkembang pada kedua belah pihak dalam bentuk postingan (berupa teks, video, gambar dan lain-lain). Sebagai sebuah bentuk konstruksi realitas yang dibangun oleh staf sebagai bentuk perspektif kolektif dari gerakan Free West Papua Campaign. Postingan – postingan mengenai konflik mengandung unsur representasi terhadap fenomena, isu maupun aktor – aktor tertentu yang digambarkan dalam teks maupun foto. Representasi melalui teks pada dasarnya selalu memuat kepentingan khusus oleh pihak yang menyebarkannya. Teks dijadikan sebagai sebuah media untuk pertarungan ide, kepentingan dan alat legitimasi terhadap suatu ideologi tertentu dari kelas tertentu. sedangkan menurut Eriyanto dalam bukunya, representasi bisa dimaknai sebagai deskripsi gambaran atau imajinasi dalam pikiran kita atas merepresentasikan hal lain. Dalam hal ini bahasa merupakan sistem representasi di mana ia berfungsi sebagai tanda yang merepresentasikan konsep atau ide atas sebuah aktor (Eriyanto, 2009). Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap dapat mendeskripsikan representasi operasi militer TNI/Polri di Nduga dalam teks pemberitaan Konflik Nduga pada tahun 2018-2019 di Papua Barat oleh Free West Papua Campaign dalam situs *website* www.freewestpapua.org. dan juga dapat mendeskripsikan konteks sosio-kultural dan politik yang membentuk eksistensi pemberitaan Konflik Nduga di Papua Barat pada tahun 2018-2019 oleh Free West Papua Campaign.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) dengan model milik Norman Fairclough sebagai alat analisis. Titik fokus dari analisis wacana kritis model Fairclough sendiri terletak pada pemahaman bahasa sebagai tindakan dan praktik kekuasaan. Dengan dasar pemikiran sedemikian rupa, analisis wacana kritis model Fairclough cenderung melihat pengguna bahasa sebagai subjek yang tidak netral dan cenderung membawa nilai ideologis tertentu. Pemahaman wacana sebagai sebuah *social practice* memberikan beberapa implikasi yang harus dipahami oleh peneliti analisis wacana kritis. Yaitu yang pertama adalah bahwa wacana adalah bentuk tindakan dan terbentuknya wacana dilatarbelakangi oleh aspek sosial dan sejarah. Kedua paham tentang wacana ini menciptakan sebuah hubungan *dialectical* antara satu sama lain. Karena itulah, wacana memiliki andil dalam menciptakan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan melihat bahasa sebagai wacana dan sebuah *social practice*, peneliti harus memahami analisis wacana bukan hanya sebagai alat analisis teks, proses produksi dan interpretasi, tetapi juga dengan menganalisis hubungan yang terjalin antara teks, proses dan kondisi sosial di sekitarnya (Fairclough, 1989).

Gambar 1. Model Analisis Wacana Kritis



Sumber: (Fairclough, 1989)

Dimensi pertama yang disebutkan di dalam *dimensions of discourse* di atas adalah teks. Di dalam dimensi ini, Fairclough ingin menganalisis unsur – unsur teks secara linguistik. Menurut Eriyanto, unsur teks dalam metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough disusun untuk menjawab tiga masalah yang dapat ditemukan dalam analisis tekstual yaitu masalah representasi, relasi dan yang terakhir adalah identitas (Eriyanto, 2011). Unsur representasi sendiri dapat dilihat melalui representasi yang terdapat dalam anak kalimat, kombinasi anak kalimat dan rangkaian antarkalimat. Dengan menganalisis unsur ini, penulis dapat memahami konsekuensi ideologis tertentu dalam pengartian teks dan pemaknaan yang ingin disampaikan oleh jurnalis. Selain representasi, unsur yang harus dianalisis selanjutnya adalah relasi. Analisa unsur ini berguna untuk memahami hubungan aktor yang dikonstruksi oleh jurnalis di dalam teks. Dengan memahami konstruksi relasi yang ditampilkan di dalam media, penulis diharapkan dapat memahami pola kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Unsur terakhir yang akan dianalisis dalam dimensi teks adalah identitas. Analisa unsur identitas fokus menganalisis tentang konstruksi identitas wartawan yang ditampilkan dalam sebuah teks. Identitas yang dimaksudkan adalah bagaimana wartawan menempatkan dan mengidentifikasikan dirinya dengan masalah, ideologi dan kelompok sosial yang terlibat dalam teks.

Sedangkan dimensi kedua yang disebutkan dalam *dimensions of discourse* adalah *discourse practice*. Fairclough mendasari penyusunan dimensi ini dengan pemikiran bahwa wacana adalah sesuatu yang dapat di produksi, di distribusikan dan di konsumsi oleh khalayak masyarakat. dalam dimensi ini, penulis harus fokus ke dalam proses di balik kemunculan sebuah teks pada sebuah media melalui analisis aktor – aktor yang berperan dalam proses produksi dan konsumsi artikel pemberitaan. Selanjutnya, Dimensi terakhir yang harus dianalisis adalah *sociocultural practice*. Dimensi ini sendiri di muncul dengan dasar pemikiran bahwa terdapat sebuah hubungan '*dialectically interconnected*' antara konteks sosial dengan bahasa atau wacana yang tersebar di dalam masyarakat. untuk menganalisis *socio-cultural practice*, Fairclough telah menyediakan tiga level analisis yaitu situasional, institusional dan sosial. Teknik analisis data yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah teknik tiga tahap analisis data yang telah disediakan oleh Norman Fairclough dalam bukunya yang berjudul "*Critical Discourse Analysis*". Dalam bukunya tersebut, ia telah menjelaskan tiga tahap

dan bentuk teknik analisis data dalam penelitian analisis wacana kritis yaitu deskripsi, interpretasi dan eksplanasi (Eriyanto, 2011).

Untuk menganalisis dimensi tekstual, penulis akan menguraikan dan juga menganalisis teks dengan menggunakan cara deskriptif. Untuk menganalisis teks yang terdapat dalam artikel pemberitaan, Eriyanto dalam bukunya mengharuskan penulis untuk menganalisis penggunaan bahasa, kata, struktur dan unsur – unsur formal dalam kalimat secara kritis. Selanjutnya, adalah tahapan interpretasi. Singkatnya, tahapan ini mengharuskan penulis untuk mencari tahu apa arti teks dan simbol yang ditampilkan dalam teks pemberitaan dengan menggunakan data yang didapatkan melalui analisa data praktik kewacanaan. Tahapan terakhir teknik analisis wacana dalam metode ini adalah tahapan eksplanasi. Dalam tahapan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti studi pustaka, penelusuran sejarah, dan lain-lain. Dalam tahapan ini, penulis diharuskan untuk menyajikan sebuah penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana sebuah teks diwacanakan sedemikian rupa melalui data analisis sosio-kultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tekstual

Di dalam bagian ini penulis akan memaparkan hasil analisis yang dilakukan pada level tekstual. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada analisis ini penulis akan mengidentifikasi pola hubungan antara aktor – aktor yang terlibat di dalam artikel pemberitaan, bagaimana identitas dari sebuah aktor tersebut didefinisikan dan yang terakhir adalah pemakaian kata – kata tertentu dalam teks. Melalui analisis ini, penulis diharapkan untuk mendapatkan sebuah wawasan tentang bagaimana FWPC membangun versi tertentu dari sebuah realitas, identitas sosial dan hubungan sosial antara aktor – aktor dalam teks pemberitaan

Tabel 1. Hasil Analisis Tekstual Artikel Pemberitaan oleh Free West Papua Campaign

No.	Aktor	Teks	Representasi
1.	ULWMP	Greatly concerned, Clarify, Peaceful movement, Respect civilians, Political and diplomatic level, Peaceful democratic solution, Reporting, Peaceful demonstrators.	Kelompok yang dipercaya sebagai representasi suara masyarakat Papua Barat.
2.	West Papuans	Villagers, Lived alongside thousands of Indonesian immigrants without fighting them, Target of Indonesian Military, Have no history, experience, nor intention of hurting civilians, ULWMP people, Security threat, Most militarised, Killing field, Sacred Land, Suffering and Displacement Villagers, Victims, Trauma, Being shot and wounded, Indigenous Papuans, Fled to the Forest, Starvation and Further Illness, Most Militarised zone in Pacific, Enduring appalling human right abuses on a daily basis, Victims, Fled, Villagers, Killed. Dead. Attacked, Wounded, Killed 31 Indonesian Road Builders, Raised their flag, Fearful, Hard and tough people, Struggled, Exhaustion and disease, Cut off from the outside world, Lived in forest, Tending their gardens raising their pigs, Civilians, Displaced, Shot, Baby, Died, Killed, Detained, Tortured, Missing, Hiding, At risk,	Kelompok <i>Indigenous</i> yang polos, tertindas, tidak berdaya dan korban atas penyalahgunaan kuasa Pemerintah dan Pasukan Gabungan Militer Indonesia.

		Scared, Indigenous Community, Civilians, Killed, Victims, Flee , Indigenous Villagers, Not allowed to leave their house, Long hair and dread locks, Being shot by military members, Executed as act of revenge by military members, Injured, Feared repressive acts by military members, Sick, Could not find any food, Missing, Panicked, Trauma, Resident, Flee to escape clashes, Afraid, Trauma, Subjected to security operations, Deteriorating health, Unable to attend classes, Poorest regions despite its rich natural resources, Declaring independence but rejected.	
3.	Indonesian Military	Bombing, In retaliation, External threats, Sporadic acts of killing, See every west papuan as a target, "Mysterious killings", Torture west papuas, Violate west papuan rights, Rape west papuan ancestral land for natural resources, Existential threat to West Papuans, Illegal business, Bombing, Conflicting reports, Executing Evacuations, Policing the entire region of West Papua, Ongoing point of contention, "secure" Indonesia's financial interest in West Papua, Biggest threat to the life of West Papuans, Major operation, Illegal or Banned Weapons, Confirms the weapons, Firing a type of gas on the villages, Bombing, Sealed off the area, Retrieve the bodies of 31 Indonesian road builders, Presented as humanitarian act , Nothing was really as it seemed, Heavily armed and with full air support, Teach West Papuans a lesson, Going to kill, Arrested flag-raising ceremonies attendee and protestor, Dropped high explosive and shrapnel to the villages, Pursuing West Papuans, Shooting West Papuans, Shooting, Brutal crackdown, Heavily armed operations, Killing, Detaining, Torturing, Track West Papuan Guerilla, Illegal use of chemical weapons against civilians, Denying TNI has targeting civilians , Said it had provided protection, Bombing, Military Raid, Attacked, Military Offensive in response, Dropped seven explosives, Fire caliber machine guns at various targets, Excluded from the rescue team, Attacked village, Intimidating villagers, Threatening to kill villagers, Ordered , Forcing indigenous villagers to cut long hair and dread locks, Not able to evacuate, Shot dead by military members, Opened fire at villagers, Attempting execution, Execute villagers as act of revenge, Released multiple shot, Government security forces, Launched operation to capture those responsible in the killings, Restoring security, Protecting citizens and displaced people, Feared by West Papuans, Provide security while working on construction project, Add the climate of fear.	Institusi yang kejam, brutal, rasis, pembunuh warga sipil, tidak berperikemanusiaan, tidak dapat dipercaya dan oportunist.
4.	Indonesian Government	On Going Band on Foreign Journalist, Media Propaganda, Manipulating Events, Their Own Interest, Depicting West Papuans as Savages,	Tidak demokratis, manipulatif, rasis, penjajah, tidak

		Systematically Stunt, False claim, Excuse, Systematically ethnically cleanse and wipe out the entire west papua population, Indonesia colonial occupation, Slow-motion genocide, False promises of 'development, Illegal weapons, Banned and heavily restricted Journalist, Signatory of Anti-personnel landmine convention, Arrested peaceful demonstrators, Occupying West Papua, Annexed , Launched military operation in the West Papua , Development, Massacre Raided, Destroyed, Imprisoning activist, Deployed 600 soldiers , Caused widespread violence, ecological destruction, and social upheaval, Stalled projects, Promise to develop the resource-rich area, Maintains the practice of violence, Contradicted, Prolong people's trauma , Unfair, Reject independence of West Papua, Invaded, Annexed.	berperikemanusiaan dan kejam.
5.	Indonesian People	Solidarity, Indonesian immigrants, Not ULWMP enemy, Good Neighbours, Growing support , Protesting.	Pendukung kemerdekaan Papua Barat. Tidak mendukung tindakan kekerasan Pemerintah Indonesia.
6.	The West Papua Liberation Army	Not criminals, Right to live peacefully, Their own ancestral land, Defend themselves, Do not target civilians, Do not engage in sporadic acts of killing, Protecting nation, National army, Protect civilians.	Kelompok Resistensi dan pelindung masyarakat Papua Barat.
7.	Indonesian Media	Inconsistent.	Informasi tidak dapat dipercaya dan Alat propaganda Pemerintah Indonesia.
8.	Australia Government	Acknowledged the ongoing violence, Condemns all violence, Monitoring, Diplomatic Missions, Ignoring and Denying , Closest Neighbours, Remains at arm's length.	Aktor yang tidak peduli terhadap pelanggaran Hak asasi manusia di Papua Barat.
9.	31 Road Workers	Indonesian Road Builders, Attended, Taking photos and video of the crowd, Threatening, Killed, Indonesian People.	Terbunuh karena eksistensi mereka mengancam keamanan masyarakat Papua Barat.
10.	West Papuans Leaders	Blaming on Indonesian Military, Calling for Indonesia to allow humanitarian agencies and foreign media.	Kelompok yang dipercaya sebagai representasi suara masyarakat Papua Barat

11.	The West Papuan Guerilla	Launched a deadly attack, The Liberation Army, The armed wing of the domestic separatist, OPM, Not been known historically to target civilians, Professional military organisation.	Kelompok separatis yang tidak pernah membunuh masyarakat sipil.
12.	Rescue Team	Evacuate, Excluding Indonesian Military, Rescue Mission.	Kelompok yang membantu masyarakat Papua Barat yang menjadi korban kekerasan. Kelompok yang dipercaya Masyarakat Papua Barat.
13.	Government Contractors	Missing, Killed, Contracted by Indonesian Government, Build the Trans Papua Road, Agreement, Did not allow, Fearing , Took Pictures, Suspected, Refusing, Arrested.	Bagian dari pemerintah Indonesia, korban, pengganggu dan pendusta.
14.	TPN-PB	Agreement, Provocated, Donating, Suspecting, Seizing, Checking, Threatening, Questioning, Arresting, Resistance Members, Released, Resistance Leaders, Attacking, Separatist rebels, Killed 19 construction workers, The insurgents, Armed wing of the Free West Papua Movement (OPM), Claimed responsibility for the killings.	Kelompok resistensi pelindung masyarakat Papua Barat yang menggunakan kekerasan hanya karena terancam.

Analisis Praktik Diskursus

Dalam tabel di bawah ini, penulis akan menjelaskan hasil dari analisis proses produksi teks yang mana merupakan salah satu sisi dari level praktik diskursus. Dalam bagian ini, penulis tentunya diharapkan untuk memberikan hasil analisis dari aspek – aspek terpenting dalam proses produksi sebuah teks yaitu sisi individual dari wartawan atau jurnalis yang berperan dalam penulisan teks dan juga hubungan antara wartawan atau jurnalis dengan organisasi media yang terkait.

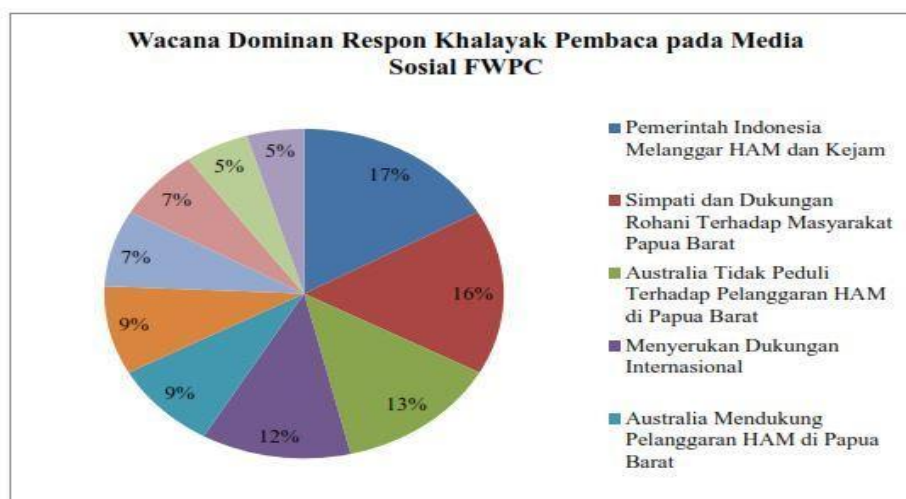
Tabel 2. Hasil Analisis Praktik Diskursus - Proses Produksi

No.	Nama Wartawan/Jurnalis	Peran	Latar Belakang
1.	Benny Wenda	Ketua ULWMP	Saksi langsung atas kekerasan pasukan militer Indonesia, Korban dari rasisme sistemis di Indonesia. Memandang bahwa eksistensi pemerintahan Indonesia di tanah Papua sebagai bentuk dari tindakan kolonialisme.
2.	John Martinkus	Jurnalis Investigasi dan Penulis Buku	Jurnalis Investigasi yang memiliki ketertarikan terhadap isu – isu yang muncul di wilayah konflik.
3.	Mark Davis	Jurnalis Investigasi dan Lawyer	Melihat bahwa langkah militer dan pembangunan trans-papua yang diambil Pemerintah Indonesia mengancam kehidupan

			mengangkat isu – isu <i>power abuse</i> yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan militer.	masyarakat lokal Papua Barat.
4.	Helen Davidson	Reporter Guardian Australia	Jurnalis dan Reporter yang sering mengangkat isu kekerasan dan hak asasi manusia yang terjadi di Asia Pasifik. Khususnya, Papua Barat, Papua New Guinea dan Timor Leste.	
5.	Victor Mambor	Jurnalis dan Pendiri Media <i>Online</i> jubi.com	Masyarakat Papua Barat. Selain menjadi jurnalis, Victor Mambor aktif menjadi aktivis dan sering kali mengkritik pemikiran hitam putih dalam memandang konflik yang terjadi di Papua. Ia menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua. Karena itu, Ia mendukung tindak penyelesaian masalah bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Masyarakat Papua Barat.	

Selanjutnya, penulis berusaha melihat bagaimana proses konsumsi teks oleh khalayak pembaca mempengaruhi proses pembuatan teks yang terdapat pada sebuah artikel berita. Untuk menganalisis proses konsumsi teks, penulis akan mengambil data respons khalayak pembaca berita (dalam bentuk komentar, *retweet*, *like*, dan *quote retweet*) melalui akun media sosial yang telah disediakan oleh *freewestpapua.com* yaitu akun pengguna Twitter @BennyWenda dan @FreeWestPapua dan juga yang terakhir adalah halaman Facebook Free West Papua Campaign (@FreeWestPapua). Pengambilan respons melalui sosial media sendiri dipilih oleh penulis karena ketiadaan fungsi respons berupa *like* maupun komentar dalam *website* *freewestpapua.com*. Karena tidak adanya fungsi komentar dalam *website* tersebut, interaksi antara admin dari Free West Papua Campaign dengan khalayak pembaca hanya dapat terjalin melalui sosial media.

Gambar 2. Hasil Analisis Praktik Diskursus - Proses Konsumsi Khalayak



Penulis telah menyediakan diagram yang menyajikan informasi terhadap wacana-wacana dominan yang sering ditemukan dalam respons khalayak pembaca artikel

pemberitaan FWPC. Melalui diagram di atas, dapat diketahui bahwa wacana yang paling banyak muncul sebagai respons adalah wacana bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar HAM dan melakukan hal – hal yang diidentifikasi sebagai perlakuan yang kejam oleh khalayak pembaca.

Analisis Praktik Sosio-Kultural

Dimensi terakhir yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah dimensi *sociocultural* atau praktik sosiokultural. Analisis ini sendiri dilandasi oleh sebuah asumsi bahwa konteks sosial yang terdapat di luar organisasi media sangat berpengaruh terhadap bagaimana proses pembentukan dan bahkan munculnya wacana di dalam sebuah media. Menurut Norman Fairclough, perubahan konteks sosiokultural sendiri dapat dianalisis melalui tiga tingkatan yaitu yang pertama adalah melalui tingkatan situasional, institusional dan yang terakhir adalah tingkatan sosial.

Situasional

Peristiwa pertama yang terjadi di sekitar waktu pengunggahan artikel berita pada *website* freewestpapua.org adalah aksi peringatan 1 Desember. Jika dilihat melalui perspektif sejarah, tanggal 1 Desember merupakan hari yang sangat bersejarah bagi perjalanan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. pada tanggal yang sama di tahun 1961, dengan diikuti oleh proses pengibaran bendera bintang kejora, Papua Barat secara administrasi telah diakui oleh Belanda sebagai sebuah negara yang independen. Sejak tahun ini, sebagian masyarakat Papua Barat terus memperingati tanggal tersebut sebagai hari kemerdekaan Papua Barat atas Belanda melalui aksi pengibaran bendera bintang kejora dan juga unjuk rasa. Pada tanggal 1 Desember 2018, ribuan mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP atau Aliansi Mahasiswa Papua menggelar sebuah aksi demonstrasi serentak di berbagai kota di Indonesia. dalam aksi demonstrasi tersebut mahasiswa Papua Barat menyuarkan berbagai tuntutan – tuntutan terhadap pemerintah Indonesia. salah satunya adalah pemberian hak masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri, penolakan terhadap penindasan terhadap masyarakat Papua dan juga aksi represif yang dialami mahasiswa Papua selama hidup dan mencari ilmu di daerah – daerah lain di Indonesia. disisi lain, Menurut KONTRAS, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Papua sering kali diselimuti oleh tindakan – tindakan seperti intimidasi, persekusi dan juga ancaman dari pihak masyarakat maupun ormas yang menolak adanya diskusi dan demonstrasi mahasiswa Papua karena dianggap melanggar hukum dan merupakan tindakan makar. selain itu, mengikuti aksi penolakan oleh ormas dan juga masyarakat lokal terhadap aksi peringatan 1 Desember pada tahun 2018, tindakan – tindakan evakuasi, penjemputan dan pemulangan mahasiswa Papua ke Daerah masing-masing dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Hal ini tentunya mengundang berbagai wacana dan kontroversi khalayak. Khususnya masyarakat Papua Barat yang dari awal telah mempertanyakan adanya tindakan – tindakan represif yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan juga pihak aparat kepolisian Indonesia.

Peristiwa kedua yang terjadi adalah peristiwa penembakan ke-31 Pekerja PT. Istaka Karya di Nduga, Papua. peristiwa ini sendiri merupakan peristiwa yang sangat kontroversial. Kontroversialitas ini diakibatkan oleh kesimpangsiuran informasi terhadap waktu dan kronologi dari peristiwa tersebut. Tentang bagaimana peristiwa ini mempengaruhi FWPC dalam memproduksi wacana – wacana mereka dapat dianalisis melalui tindak masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam merespons konflik yang terjadi. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Papua Barat merupakan sebuah wilayah yang rentan akan adanya kesalahpahaman. Selain karena didorong oleh adanya hegemoni wacana yang diselimuti oleh stereotip – stereotip terkait masyarakat Papua sejak kolonialisme Belanda, kesalahpahaman juga diakibatkan oleh lemahnya mobilitas arus informasi di Papua Barat. kelemahan ini sendiri

muncul karena eksistensi kebijakan – kebijakan kontroversial terkait dengan kebebasan pers di Papua. tentunya, hal ini sering kali mengundang berbagai kritik. Salah satunya adalah kritik yang dilayangkan oleh RSF di mana mereka menganggap bahwa wilayah Papua Barat merupakan *information black hole*.

Selain ketidakpastian informasi terkait dengan konflik yang terjadi di Papua Barat, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggapi konflik penembakan juga sangat mempengaruhi wacana – wacana yang muncul dalam artikel pemberitaan FWPC terkait dengan konflik ini. Pada tanggal 5 Desember, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku penembakan yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. keterangan yang diungkapkan melalui konferensi pers tersebut diikuti dengan keterangan bahwa ia juga mengutuk tindakan kekerasan bersenjata tersebut dengan mengatakan bahwa penembakan yang dilakukan oleh KKB tersebut merupakan tindakan yang biadab (BBC News, 2018). Selain itu, dalam konferensi pers tersebut Joko Widodo sering kali menginformasikan tentang pekerjaan keras dan pertaruhan nyawa yang dilakukan oleh pekerja dalam ‘membangun tanah Papua’ dan juga menekankan bahwa pembangunan tanah Papua merupakan salah satu bentuk pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan perspektif melalui media massa Indonesia terkait dengan konflik Penembakan yang terjadi di Nduga tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi asumsi publik terhadap organisasi – organisasi yang secara ideologis dan politik dekat dengan TPN-PB. sebagai salah satu organisasi yang memiliki tema tujuan yang sama, FWPC yang sering mendeklarasikan dan memperkenalkan diri sebagai kelompok *non-violent* tentunya memiliki beban tersendiri untuk segera memberikan keterangan yang dapat menjustifikasi tujuan, eksistensi dan hubungan organisasi mereka dengan TPN-PB di mata publik khalayak.

Institusional

Analisis *sociocultural practice* kedua yang akan dianalisis oleh penulis adalah analisis level institusional. Menurut Eriyanto, analisis pada level institusional sendiri membantu penulis untuk menjelaskan kekuatan - kekuatan internal maupun eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi penentuan proses produksi berita (Eriyanto, 2009). Analisis level ini akan membahas dua faktor penting dalam pembentukan proses produksi berita, yaitu faktor ekonomi media dan yang kedua adalah faktor institusi politik.

Faktor Ekonomi Media

Jika dianalisis melalui *website* freewestpapua.org, Institusi Free West Papua Campaign sendiri bukanlah sebuah institusi yang dapat dikategorikan sebagai institusi profit *oriented*. Tetapi, disisi lain, produksi media pada masa ini tidak dapat dilepaskan dari proses ekonomi media yang mana secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu keberlangsungan institusi media itu sendiri (Ks, 2009). FWPC memiliki dua bentuk sistem ekonomi, Salah satu dari sistem ekonomi media yang diadopsi oleh Free West Papua Campaign adalah sistem sponsor. Melalui *websitenya*, dapat diketahui bahwa Free West Papua Campaign sendiri memiliki empat institusi yang diklaim sebagai pendukung organisasinya tersebut. di bawah ini, penulis telah menyajikan sebuah tabel yang menjelaskan jenis dan nilai ideologi yang diangkat oleh institusi – institusi yang telah mendukung Free West Papua Campaign:

Tabel 3. Hasil Analisis Sistem Ekonomi Media

	The Bertha Foundation	Lush	Court Lodge Organic Farm	Kava King Products
Headquarters	United Kingdom	United Kingdom	United Kingdom	Vanuatu

Jenis Institusi	NGO	Company	Company	Company
Value	Social justice through activism, media, and the law, Human Rights.	Human rights, Environmental Conservation, Animal rights	sustainability, animal welfare, universal human rights and community oriented.	Sustainability and Community Oriented.

Selain sistem sponsor, FWPC juga memiliki sistem ekonomi media lainnya, yaitu sistem *funding*. sistem *funding* sendiri merupakan salah satu opsi yang dapat diambil oleh khalayak untuk mengambil peran dan membantu FWPC untuk mempromosikan tujuan organisasi yaitu demokrasi, meningkatkan kesadaran dan referendum kemerdekaan di Papua Barat. Melihat bagaimana sistem tersebut bekerja, dapat dipahami bahwa sistem *funding* ini cenderung bersifat sukarela. Sifat sukarela ini bukan berarti bahwa sistem *funding* tidak membawa pengaruh apa – apa terhadap pembentukan wacana pada media FWPC. Sebaliknya, munculnya rasa kesukarelaan ini membutuhkan sebuah dorongan – dorongan seperti rasa kepedulian dan simpati untuk membantu sebuah aktor tertentu (Wilson, 2000). Tentunya sebagai sebuah media, FWPC sangat memahami hal tersebut. Karena itu, untuk membangun sebuah dasar kepentingan dan kesadaran untuk keterhubungan antara khalayak dengan FWPC, FWPC harus membangun sebuah narasi atau wacana yang mana dapat memberikan atau mendorong motivasi khalayak untuk membantu kepentingan mereka.

Faktor kedua yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah faktor institusi politik. Institusi politik yang dimaksudkan di dalam faktor ini sendiri merupakan institusi yang cukup kuat dan memiliki *power* untuk mengeluarkan kebijakan yang mana pada nantinya dapat mengatur kehidupan bermasyarakat seperti negara. Untuk menjelaskan faktor ini, pertamanya penulis akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mempengaruhi produksi wacana FWPC melalui kebijakan – kebijakan yang telah dikeluarkan. khususnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan sistem pers yang secara langsung mempengaruhi arus wacana alternatif atas terjadinya konflik di Nduga pada tahun 2018.

Indonesia sendiri merupakan negara yang terus mengalami perubahan sistem demokrasi. meskipun begitu, dalam sistem pemerintahannya dapat diakui bahwa Indonesia memiliki hukum dan institusi yang menjalankan peran pelaksanaan eksekutif, legislatif, konstitusi dan media. Meskipun memiliki sistem yang sempurna untuk dikategorikan sebagai negara yang demokratis, Faktanya Indonesia masih sering tersandung beberapa masalah yang terkait dengan pelanggaran pilar – pilar demokrasi. salah satunya adalah masalah yang terkait dengan pembungkaman pers. Isu pembungkaman pers sendiri merupakan isu yang sering dipertanyakan oleh khalayak internasional. meskipun telah di dasari dengan undang – undang yang mendasari kebebasan pers seperti UU No. 40/1999, Eksistensi kebebasan pers di Papua Barat sering kali dianggap masih belum terasa sepenuhnya.

Dalam pemerintahan Joko Widodo, iklim kebebasan pers seolah – olah telah berubah menjadi lebih baik karena ia menjanjikan bahwa selama dalam masa pemerintahannya ia akan memperbolehkan jurnalis asing untuk menjalankan perannya di tanah Papua. Tetapi melalui fakta dan keterangan para jurnalis di lapangan, sampai dengan tahun 2018, pembatasan akses terhadap jurnalis asing masih kerap terjadi (Rismawati & Siahaan, 2014). Selain adanya pembatasan akses jurnalis, Pemerintah Indonesia juga sering kali di kritik atas penutupan dan

pemblokiran terhadap media – media lokal di Papua. salah satunya contohnya adalah pemblokiran suarapapua.com yang mana dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia tanpa adanya keterangan dan penjelasan yang memadai (Nurhadi, 2016). Beberapa kasus di atas memperlihatkan bahwa kebebasan pers di Indonesia telah hadir secara “*de jure*”. Tetapi disisi lain secara “*de facto*”, kebebasan pers di Indonesia masih sering dipertanyakan kembali eksistensinya.

Dimensi Sosial: Pengaruh Perkembangan Sistem Budaya Komunikasi dan Sistem Hukum Budaya Internasional terhadap Proses Produksi dan Distribusi Wacana

Setelah perang dunia ke-2 kepopuleran pendekatan *top down* dan juga *bottom up* perlahan – lahan menantang eksistensi konsep *nation state*. Muncul dan bertumbuh pesatnya berbagai bentuk lembaga supranasional dan kemunculan berbagai bentuk gerakan *grassroot* melalui teknologi internet yang memberikan sebuah harapan bagi masyarakat yang termarjinalkan dalam praktik politik konvensional yang cenderung majoritarian merupakan bukti atas Bergeraknya budaya politik menuju budaya politik kontemporer. Melalui ruang publik yang terbentuk melalui dunia maya, masyarakat termarjinalkan mendapatkan sebuah ruang dinamis dan egaliter di mana mereka dapat merepresentasikan kepentingannya melalui teks secara lebih bebas dan aman. Dengan sifatnya yang berjaring, aditif, interaktif dan polisentris, internet dapat mengakomodasi berbagai jenis praxis politik yang berbeda dari berbagai wilayah dan waktu di dunia. Hal ini tentunya mendorong terbentuknya berbagai bentuk *new social movements* seperti contohnya adalah gerakan FWPC itu sendiri.

Sebagai salah satu gerakan *transnational activism*, FWPC tentunya melihat perkembangan ini sebagai sebuah celah untuk mencari atau memperluas target konsumen dari wacana mereka. eksistensi dari *network society* yang terbentuk melalui adanya kesamaan minat antara sesama pengguna sosial media atas sebuah isu dan topik membuka sebuah kesempatan bagi gerakan *transnational activism* seperti FWPC untuk melaksanakan kegiatan aktivisme tanpa adanya ancaman dari hegemoni saluran komunikasi publik yang biasanya sering ditemui dalam sistem budaya komunikasi tradisional yang masih dibatasi oleh batas negara. Dengan adanya aktivisme *online* dan ketiadaan aktor negara yang selama ini berperan besar dalam praktik hegemoni wacana media, masyarakat yang cenderung mengalami represi dalam praktik politik konvensional dapat menerapkan atau menyuarakan agenda politik mereka melalui praktik politik digital yang sifatnya lebih bebas, non-struktural, lebih dinamis dan egaliter.

Selain kebebasan berekspresi yang ditawarkan oleh *cyberspace*, faktor lain yang dapat mempengaruhi produksi wacana FWPC sendiri adalah isu – isu populer dari target khalayak yang telah ditentukan. hal ini sesuai dengan argumen Sassen, di mana ia mengatakan bahwa untuk memaksimalkan konektivitas dan interaksi politik dalam *global networks*, sebuah aktor harus berusaha untuk melokalisasi tujuan aksi politiknya (Sassen, 2004). Lokalisasi ini akan membantu aktor politik tersebut untuk membangun sebuah rasa persatuan khalayak pembaca untuk berpartisipasi dalam tujuan mereka. dalam artian lain, aktor politik seperti FWPC harus menganalisis konflik apa saja yang sering muncul di dalam wilayah dari target wacana. Dengan menganalisis dinamika konflik, FWPC dapat memilih beberapa isu yang marak terjadi dan perlu di resistensi bersama oleh khalayak publik. Pemikiran ini juga didukung oleh argumen Melucci, yaitu bahwa untuk melakukan promosi kepentingan, sebuah aktor politik harus mengidentifikasi ‘*general interest*’ dari sebuah komunitas (Bartholomew & Mayer, 1992).

Wacana yang memberikan efek *'sense of belonging'* atau representasi seperjuangan dari komunitas target wacana akan membangun sebuah solidaritas dari khalayak.

Seperti yang telah dijelaskan pada analisis tekstual artikel pemberitaan, dapat dipahami bahwa FWPC sering kali menggunakan beberapa isu yang sengaja ditonjolkan dalam penulisan berita. Isu yang sering muncul adalah isu pelanggaran hukum internasional, pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran nilai – nilai demokrasi pada penyelenggaraan operasi militer di Nduga. Jika dikaitkan dengan pentingnya pembangunan *'sense of belonging'* atas khalayak pembaca berita, dapat dipahami bahwa penonjolan isu – isu tertentu yang berulang merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh FWPC untuk meraih tujuan mereka. Untuk memahami mengapa FWPC menonjolkan isu – isu tersebut, penulis harus memahami ruang dan komunitas yang menjadi target atas pemberitaan. dalam penelitian ini, penulis mengambil dua budaya yang menjadi faktor pemilihan isu – isu tersebut, yaitu yang pertama adalah budaya dalam *cyberspace* dan juga budaya gerakan aktivisme *online*.

Menurut Habermas, *shared moral* bukanlah hal satu – satunya yang harus dimiliki oleh sebuah kelompok untuk menggaet solidaritas. Solidaritas juga membutuhkan sebuah *shared political culture* sebagai sebuah mediator antara satu aktor dengan yang lainnya (Habermas & Rehg, 2001). Sebuah aktor harus memiliki kemampuan untuk menerjemahkan sebuah konflik atau isu agar dapat menguatkan klaim mereka menjadi sebuah realitas bersama. Artinya, penggunaan isu moral seperti hak asasi manusia tidaklah cukup untuk menggaet solidaritas, karena itu gerakan FWPC juga sangat menekankan isu – isu lain seperti isu pelanggaran nilai demokrasi yang mana kasusnya sering ditemui di berbagai negara demokrasi. Selain itu, latar belakang penggunaan isu pelanggaran nilai demokrasi juga dapat ditelusuri melalui sejarah dari kemunculan *cyberspace* itu sendiri. Kemunculan *cyberspace* didasari dan diselimuti oleh euforia atau semangat kebebasan berekspresi dan demokrasi (Faisal, 2007). Karena itulah, dengan menyertakan isu pelanggaran prinsip - prinsip demokrasi, FWPC setidaknya memiliki semangat *political culture* yang sama dengan komunitas *cyberspace* untuk meraih sistem demokrasi yang didambakan oleh khalayak *cyberspace*. Di saat yang sama, hal tersebut tentunya memberikan alasan untuk khalayak tersebut untuk mendukung gerakan FWPC.

Latar belakang penggunaan isu pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional dalam artikel pemberitaan FWPC juga dapat ditelusuri melalui sistem hukum internasional yang merupakan bentuk konsensus di masyarakat internasional pada masa tersebut. Penggunaan pengasosiasian wacana tertentu membantu khalayak untuk mengidentifikasi siapakah aktor yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan juga siapakah aktor yang menjadi korban atau warga sipil. Selain itu, dengan asumsi – asumsi yang terbentuk melalui identifikasi tersebut, FWPC sekali lagi dapat melegitimasi perjuangan dan eksistensinya melalui wacana – wacana yang telah diproduksinya. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui bagaimana strategi *framing* dalam pemberitaan membantu FWPC untuk memobilisasi partisipan dan juga mendiagnosis masalah bersama (Sydney, 1989). Hal ini Motivasi khalayak untuk memberikan dukungan mereka dengan memberikan sebuah alasan atau urgensi untuk ikut mendukung gerakan tersebut. Dengan identifikasi diri sebagai pihak yang menjadi korban ketidakadilan dan ketimpangan dari pihak yang berkuasa, sesuai dengan argumen dari Cunningham, organisasi *self-determination* seperti FWPC akan mendapatkan simpati dari komunitas internasional. Hal ini dikarenakan oleh adanya fungsi yang memperbolehkan komunitas internasional dalam mengupayakan pembatasan pelanggaran dan penindasan hak asasi manusia. dengan kata lain, Dengan melibatkan isu – isu yang telah dilindungi oleh hukum internasional, kehadiran wacana – wacana alternatif oleh FWPC dapat digunakan sebagai alat justifikasi, konsesi dan salah satu strategi untuk melindungi eksistensi

mereka dari represi negara pada tingkat internasional. Disisi lain, representasi identitas *non-violence* FWPC memiliki peluang lebih besar untuk meraih kepercayaan dari pihak – pihak konstituen (Cunningham, 2018). Peluang ini juga dibahas oleh Chenoweth dan Fazal dalam bukunya, di mana ia berpendapat bahwa peluang dapat diraihnya legitimasi atau toleransi atas eksistensi oleh organisasi *self-determination* akan meningkat jika organisasi tersebut dapat menampilkan diri mereka sebagai organisasi yang *legitimate* di dalam kelompok mereka sendiri, aktor yang menyerupai negara, dan yang terakhir adalah aktor yang tidak menggunakan kekerasan dalam meraih tujuan mereka (Cunningham, 2018).

Jika dianalisis tema dari isu – isu tersebut, dapat dipahami bahwa isu – isu yang telah disebutkan di atas merupakan isu yang sering dikaitkan dengan terjadinya konflik struktural. Isu struktural yang menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan inilah yang menjadi isu utama atau isu populer dalam dunia aktivisme *online*. Mengetahui fakta tersebut, bukan merupakan hal yang aneh bahwa FWPC berusaha meng-*highlight* isu tersebut. sebagai organisasi yang membutuhkan peran solidaritas dari khalayak pembacanya untuk meraih tujuannya, tindakan ini merupakan tindakan yang masuk akal. Dengan menggunakan isu yang membangun sebuah '*sense of belonging*' tersebut, FWPC secara sengaja ingin mendorong terbentuknya sebuah kesadaran kritis dalam publik. Kesadaran kritis yang menimbulkan melek politik ini tentunya akan memberikan sebuah efek kontestasi melalui diskusi terhadap wacana dominasi terkait dengan narasi konflik Papua Barat oleh aktor negara. Dengan kesadaran ini pula, FWPC ingin khalayak memandang konflik Papua Barat dengan cara pandang yang baru. Meskipun tidak dapat meraih tujuan referendum, setidaknya melalui pembangunan narasi alternatif, FWPC dapat dan bahkan telah berhasil membangun sebuah legitimasi atas eksistensi dan perjuangan mereka dari khalayak transnasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis wacana operasi militer dalam narasi pemberitaan konflik Nduga oleh Free West Papua Campaign ini, Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam narasi pemberitaannya, Free West Papua Campaign cenderung merepresentasikan program operasi militer yang diturunkan oleh pemerintah untuk merespons terjadinya konflik di Nduga pada bulan Desember 2018 sebagai bentuk pelanggaran prinsip demokrasi dan kekerasan hak asasi manusia yang dilakukan negara terhadap masyarakat sipil dan juga sebagai dalih elite negara untuk mempertahankan kepentingan pribadinya di Papua Barat. Karena menurut Fairclough wacana adalah pemakaian bahasa sebagai praktik sosial dan juga tindakan atau respons atas apa yang terjadi di dunia. Setelah melihat konteks situasional yang terjadi sesaat sebelum diunggahnya teks pemberitaan, dapat dipahami bahwasanya penggunaan wacana – wacana pelaksanaan operasi militer yang penuh dengan konotasi negatif oleh Free West Papua Campaign tersebut digunakan untuk menanggukkan wacana populer terkait dengan pelaksanaan operasi militer sebagai pelindung kepentingan kesejahteraan masyarakat sipil di Papua Barat.

Jika dianalisis melalui konteks sosial yang hadir di sekitar proses produksi pemberitaan, dapat dipahami bahwa wacana ini berusaha menanggukkan wacana dominan yang sangat populer khususnya pada kalangan masyarakat Indonesia bahwa operasi militer hadir di tanah Papua untuk melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban atas konflik yang terjadi di Nduga. Dengan mengidentifikasi aktor operasi militer seperti TNI dan Polri sebagai aktor yang rasis, kejam, otoriter dan tidak demokratis, FWPC cenderung melakukan strategi delegitimasi atas pengiriman operasi militer yang terus – menerus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, dengan mengasosiasikan tindakan – tindakan kekerasan hak asasi manusia dan pelanggaran prinsip – prinsip demokrasi di tanah Papua terhadap aktor

TNI dan Polri, FWPC sebagai organisasi kampanye berusaha menggaet solidaritas internasional khususnya solidaritas komunitas *cyberspace* yang pada dasarnya eksistensi mereka dilandasi oleh semangat demokrasi. Di sisi lain, karena sangat memperhitungkan citranya sebagai sebuah organisasi *non-violent* yang taat dengan hukum internasional, FWPC tentunya harus menyesuaikan dan atau melandasi wacana – wacana mereka agar sesuai dengan nilai sistem / moral di dunia, contohnya adalah hukum internasional. Selain untuk mencari dukungan konstituen dan solidaritas internasional, dengan landasan prinsip hukum internasional, FWPC setidaknya telah berhasil membangun sebuah strategi untuk melindungi eksistensi perjuangan mereka dari represi negara pada tingkat internasional.

Selanjutnya, Wacana Operasi Militer sebagai dalih elite negara untuk mempertahankan kepentingan ekonomi di Papua Barat hadir di dalam teks pemberitaan Free West Papua Campaign sebagai salah satu bentuk penanggungan mereka atas wacana dominan yang sering dijadikan pemerintah Indonesia untuk melegitimasi eksistensi operasi militer di Nduga. Mengingat bahwa menurut Fairclough sebuah wacana yang muncul di media ditentukan oleh perubahan masyarakat dalam level sosial, budaya dan lain – lain. Dapat dipahami bahwa wacana ini muncul sebagai sebuah respons atas bagaimana pemerintah Indonesia sering kali menegaskan bahwa eksistensi operasi militer di wilayah Nduga merupakan bentuk dari kehadiran pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nduga itu sendiri. Pengidentifikasian aktor pemerintah Indonesia dan juga Militer Indonesia sebagai aktor yang oportunis dan pencuri sumber daya alam tanah Papua dilakukan untuk mengkonstruksi realitas bahwa terdapat sebuah hubungan ketimpangan antara masyarakat *indigenous* Papua Barat dan juga pihak pemerintah dan militer Indonesia. Pengasosiasian dan konstruksi realitas yang sedemikian rupa tentunya digunakan FWPC untuk menggelitik kesadaran kritis dalam publik transnasional untuk memberikan solidaritas dan dukungan untuk membantu masyarakat Papua Barat agar terbebas dari tindakan operasi militer. selain itu, dengan mengangkat isu – isu seperti ketimpangan dan ketidakadilan, FWPC juga berusaha membangun sebuah '*sense of belonging*' antara komunitas aktivisme *online* internasional untuk memperoleh dukungan politik transnasional. Argumen pembangunan '*sense of belonging*' dengan menggunakan wacana sedemikian rupa didasari oleh pemikiran Fairclough bahwasanya *sociocultural practice* menentukan teks yang akan diproduksi dan dikonsumsi dengan dimediasi oleh *discourse practice*. Nilai – nilai dalam hukum internasional seperti demokrasi dan hak asasi manusia di mediasi melalui *discourse practice* yang pada akhirnya menghasilkan sebuah teks wacana di media. Selain itu, khalayak yang mengonsumsi teks tersebut juga akan menerima teks tersebut dengan menggunakan nilai – nilai demokrasi dan hak asasi manusia. dengan pemikiran seperti ini, dengan merepresentasikan hal – hal yang dianggap tidak sewajarnya terjadi di masyarakat yang memeluk nilai demokrasi dan hak asasi manusia, FWPC berusaha membangun sebuah wacana yang dianggap sebagai sebuah kewajaran yang harus segera didukung oleh khalayak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartholomew, A., & Mayer, M. (1992). Nomads of the Present: Melucci's Contribution to 'New Social Movement' Theory. *Theory, Culture & Society*, 9(4), 141–159. <https://doi.org/10.1177/026327692009004007>
- BBC News. (2018). Jokowi tentang pelaku pembunuhan buruh proyek Papua: “Tumpas sampai ke akar-akarnya.” Retrieved September 9, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46450499>

- Cunningham, K. G. (2018). *The Efficacy of Nonviolence in Self-determination Disputes*. 1–43.
- Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana : Pengantar Analisa Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. New York: Longman Group.
- Faisal, M. (2007). Dari Anarchic Cyber Space menjadi Transnational Public Sphere. Membaca Relasi antara Cyber space dan Civil Society di Era Postmodern (Studi kasus: Greenpeace Online Activist). *Global: Jurnal Politik Internasional*, 9(2). <https://doi.org/10.7454/global.v9i2.264>
- Habermas, J., & Rehg, W. (2001). Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles? *Political Theory*, 29(6), 766–781. <https://doi.org/10.1177/0090591701029006002>
- Ks, U. (2009). *Ekonomi Media : Pengantar Konsep dan Aplikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhadi, S. (2016). Pemerintah Tak Jelaskan Pemblokiran Situs 'Suara Papua'. Retrieved May 10, 2020, from VOA Indonesia website: <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-blokir-suara-papua/3641759>
- Rismawati, N., & Siahaan, C. (2014). Kebebasan Pers dalam Perspektif Jurnalis di Daerah Konflik (Studi Kasus Pembatasan Akses Jurnalis Asing di Papua. In *Membayangkan Indonesia Baru* (pp. 141–148). Yogyakarta: Program Studi Ilmu komunikasi UII.
- Sassen, S. (2004). Local Actors in Global Politics. *Current Sociology*, 52(4), 649–670. <https://doi.org/10.1177/0011392104043495>
- Sydney, T. (1989). *Democracy and Disorder*. London: Oxford University Press.
- Wilson, J. (2000). Volunteering. *Annual Review of Sociology*, 26(1), 215–240. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.215>